

Ambiguitas Kemitraan dan Prekarisasi Kerja Digital, Host Live Streaming Dalam Dinamika Kapitalisme Platform di Indonesia

Usriya Fara Nabila¹, Moh. Ja'far Sodiq Maksum², Roosmarrani Setiawati³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

²Universitas KH. A. Wahab Habullah, Indonesia

³Universitas Darul Ulum Jombang & BBPPTP Surabaya

ARTICLE INFORMATION

KEYWORD:

*Corporate Social
Responsibility, ROA,
ROE, ROS*
DOI:



This Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRAK

Transformasi digital melalui ekonomi platform telah mengaburkan batas antara pekerja dan wirausaha. Dalam praktik live streaming commerce, host diposisikan sebagai mitra independen yang fleksibel, namun secara struktural berada dalam relasi subordinasi berbasis data. Penelitian ini menganalisis posisi host live streaming dalam perspektif sosiologi kerja dengan mengintegrasikan pemikiran Karl Marx, Max Weber, dan Karl Polanyi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif-kritis melalui kajian literatur dan analisis regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan platform merepresentasikan reorganisasi relasi kerja dalam kapitalisme digital, di mana kontrol dijalankan melalui mekanisme algoritmik yang memengaruhi visibilitas, performa, dan pendapatan host. Fleksibilitas kerja menjadi bersifat kondisional, sementara risiko ekonomi dan penalti sistem dialihkan kepada host. Kondisi ini menempatkan host pada posisi liminal antara pekerja dan pengusaha, namun secara struktural lebih dekat pada pekerja ter subordinasi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang mempertimbangkan dimensi sosial kerja digital dan prinsip keadilan sosial.

Kata kunci: sosiologi kerja, kapitalisme platform, subordinasi algoritmik, prekarisasi, ekonomi digital.

ABSTRACT

Digital transformation through the platform economy has blurred the boundary between workers and entrepreneurs. In live streaming commerce, hosts are positioned as independent partners with flexibility but remain structurally subordinated through data-driven control. This study analyzes the position of live streaming hosts from a sociology of work perspective by integrating the ideas of Karl Marx, Max Weber, and Karl Polanyi. The research uses a qualitative normative-critical approach based on interdisciplinary literature and regulatory analysis. The findings show that platform partnerships represent a reorganization of labor relations in digital capitalism, where algorithmic mechanisms regulate visibility, performance, and income. Work flexibility becomes conditional, while economic risks and system penalties are transferred to hosts. As a result, hosts occupy a liminal position between workers and entrepreneurs but are structurally closer to subordinated labor. These conditions highlight the need for policy intervention that considers the social dimensions of digital work and principles of social justice.

Keywords: sociology of work, platform capitalism, algorithmic subordination, precaritization, digital economy.

How to Cite:

Nabila, F. U., Maksum, M. J., S., Setiawati, R., (2026) Ambiguitas Kemitraan dan Prekarisasi Kerja Digital, Host Live Streaming dalam Dinamika Kapitalisme Platform di Indonesia. *Management and Education Journal*, 4(1), 27-38

*Author Correspondent:

Email: 1_usriyafaranab@gmail.com, 2jafarsodiq@unwaha.ac.id, roosmarranisetiawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah merekonfigurasi struktur kerja global secara fundamental. Platform digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai infrastruktur transaksi, melainkan sebagai rezim produksi nilai berbasis data yang mengorganisasi, mengukur, dan mengendalikan kerja melalui sistem algoritmik. Dalam konteks *live streaming commerce*, host memainkan peran sentral sebagai mediator performatif antara produk dan konsumen. Mereka membangun interaksi real-time, menciptakan kelekatan emosional, memproduksi kepercayaan, dan mendorong konversi transaksi. Namun kerja yang mereka lakukan bukan sekadar komunikasi pemasaran; ia adalah bentuk kerja afektif dan digital labor yang menghasilkan nilai ekonomi sekaligus data perilaku konsumen—yang kemudian dimonetisasi oleh platform.

Meski demikian, relasi antara host dan platform secara formal dikategorikan sebagai kemitraan, bukan hubungan kerja. Model ini dipromosikan sebagai bentuk fleksibilitas dan kewirausahaan digital—narasi yang sejalan dengan ideologi neoliberal tentang otonomi individu dan *self-enterprising subject*. Namun, jika dianalisis melalui perspektif Karl Marx, struktur tersebut memperlihatkan relasi produksi yang asimetris. Platform menguasai alat produksi digital—algoritma, data, dan akses pasar—sementara host menjual tenaga kerja performatifnya tanpa memiliki kontrol atas infrastruktur distribusi nilai. Ekstraksi nilai lebih tidak lagi semata-mata terjadi melalui pabrik fisik, melainkan melalui mekanisme komisi, monetisasi data, dan pengaturan visibilitas. Dengan demikian, kemitraan digital berpotensi menjadi bentuk baru relasi kapital-kerja yang terselubung.

Dari sudut pandang Max Weber, fenomena ini juga merefleksikan proses rasionalisasi modern dalam bentuk yang lebih canggih. Jika birokrasi klasik mengatur kerja melalui aturan tertulis dan hierarki administratif, maka platform mengatur kerja melalui kode, metrik performa, dan sistem rating. Inilah yang dapat disebut sebagai birokrasi algoritmik. Host tidak diawasi oleh manajer manusia, tetapi oleh sistem evaluasi otomatis yang menentukan peringkat, insentif, dan bahkan eksistensi mereka dalam ekosistem digital. Rasionalitas instrumental—yang menurut Weber berpotensi menciptakan “sangkar besi”—kini hadir dalam bentuk metrik performatif yang tak terlihat namun menentukan. Disiplin kerja menjadi terinternalisasi karena keberlanjutan akses pasar sepenuhnya bergantung pada kepatuhan terhadap logika algoritmik.

Sementara itu, dalam kerangka Karl Polanyi, relasi ini menunjukkan gejala *disembedding* ekonomi dari perlindungan sosial. Kerja digital diperlakukan sebagai komoditas fleksibel yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai kalkulasi pasar. Risiko fluktuasi permintaan, perubahan algoritma, dan ketidakpastian pendapatan dialihkan kepada host sebagai individu. Pasar digital beroperasi relatif terlepas dari mekanisme proteksi sosial kolektif, sehingga kerja menjadi semakin terindividualisasi dan rentan. Dalam konteks ini, fleksibilitas sering kali berarti absennya jaminan, bukan kebebasan yang sejati. Prekarisasi muncul bukan sebagai deviasi, tetapi sebagai konsekuensi logis dari rasionalitas ekonomi yang dilepaskan dari kerangka sosial.

Dengan demikian, pertanyaan tentang apakah fleksibilitas dalam kemitraan platform mencerminkan otonomi nyata atau subordinasi terselubung tidak dapat dijawab hanya melalui kategori hukum formal. Pendekatan sosiologi kerja menunjukkan bahwa di balik narasi kewirausahaan digital terdapat dinamika kekuasaan, kontrol, dan distribusi risiko yang kompleks. Host live streaming menempati posisi liminal—antara pekerja dan pengusaha—namun secara struktural lebih dekat pada pekerja tersubordinasi dalam

kapitalisme platform. Fenomena ini menandai transformasi relasi kerja dari subordinasi industrial menuju subordinasi algoritmik, di mana kontrol bersifat impersonal, terdistribusi, dan terintegrasi dalam arsitektur digital itu sendiri.

TINJAUAN LITERATUR DAN KERANGKA TEORETIS

A. Karl Marx: Relasi Produksi dan Ekstraksi Nilai

Dalam perspektif Marxian, relasi produksi merupakan fondasi yang menentukan struktur kelas dalam masyarakat kapitalis. Siapa yang menguasai alat produksi, dialah yang mengendalikan proses produksi dan berhak atas apropriasi nilai lebih (surplus value) yang dihasilkan tenaga kerja. Dalam kapitalisme industri klasik, alat produksi berwujud pabrik, mesin, dan modal finansial. Namun dalam kapitalisme platform, alat produksi mengalami transformasi ontologis: ia menjelma menjadi infrastruktur digital, sistem algoritmik, dan kepemilikan atas data. Platform bukan sekadar perantara netral, melainkan pemilik sekaligus pengendali arsitektur digital yang menentukan bagaimana kerja berlangsung, siapa yang terlihat, dan siapa yang tersisih.

Dalam konteks live streaming commerce, penguasaan atas sistem distribusi visibilitas menjadi instrumen kekuasaan yang krusial. Algoritma menentukan urutan tampil, jangkauan audiens, hingga potensi konversi penjualan. Akses terhadap konsumen sepenuhnya dimediasi oleh platform, sehingga host tidak memiliki otonomi struktural atas pasar yang mereka layani. Lebih jauh, data perilaku pengguna—preferensi, durasi tonton, pola interaksi—dikumpulkan dan dimonetisasi oleh platform sebagai sumber akumulasi kapital digital. Dalam terminologi Marx, kontrol atas alat produksi digital ini menciptakan relasi dominasi yang memungkinkan platform mengekstraksi nilai dari kerja host sekaligus dari data konsumen.

Host pada dasarnya menjual tenaga kerja digitalnya: waktu siaran, performativitas, kemampuan persuasi, serta kerja afektif dalam membangun kedekatan emosional dengan audiens. Kerja ini menghasilkan nilai ekonomi yang nyata melalui transaksi dan peningkatan trafik. Namun host tidak memiliki kontrol atas algoritma distribusi, tidak memiliki kepemilikan atas data yang dihasilkan dari interaksi mereka, dan tidak memiliki akses penuh terhadap basis konsumen yang mereka bangun. Dengan demikian, meskipun secara formal disebut sebagai mitra independen, posisi struktural host lebih menyerupai pekerja yang bergantung pada pemilik kapital digital.

Ekstraksi nilai dalam model ini berlangsung melalui dua mekanisme utama. Pertama, melalui komisi transaksi—di mana sebagian nilai ekonomi hasil kerja host langsung teralokasi kepada platform. Kedua, melalui monetisasi data—yakni konversi aktivitas kerja dan interaksi pengguna menjadi komoditas informasi yang dapat dieksploitasi lebih lanjut untuk kepentingan periklanan, optimasi pasar, dan ekspansi bisnis. Dengan kata lain, nilai lebih tidak hanya dihasilkan dari penjualan produk, tetapi juga dari produksi data yang melekat pada setiap aktivitas kerja digital. Ini menunjukkan bahwa dalam kapitalisme platform, surplus value bersifat ganda: ekonomi dan informasional.

Meskipun dikemas dalam narasi kemitraan dan kewirausahaan digital, struktur relasi ini tetap memperlihatkan asimetri kepemilikan dan kontrol. Platform menguasai kapital digital dan menentukan aturan main, sementara host berada dalam posisi ketergantungan struktural. Dalam kerangka Marxian, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk baru relasi kapital–kerja, di mana eksploitasi tidak lagi terjadi dalam ruang pabrik, tetapi dalam ruang digital yang terdesentralisasi namun tetap hierarkis. Kapitalisme platform

dengan demikian bukanlah deviasi dari kapitalisme klasik, melainkan transformasi bentuknya—dari industrial capitalism menuju digital capitalism yang berbasis data dan algoritma.

B. Max Weber: Rasionalisasi dan Disiplin Birokratik Digital

Max Weber memandang modernitas sebagai proses rasionalisasi yang semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk ekonomi. Rasionalisasi ditandai oleh dominasi rasionalitas instrumental—yakni orientasi tindakan berdasarkan kalkulasi efisiensi, prediktabilitas, dan kontrol. Dalam kapitalisme modern, birokrasi menjadi bentuk organisasi ideal karena mampu menghadirkan keteraturan melalui aturan tertulis, hierarki yang jelas, dan prosedur formal. Namun Weber juga memperingatkan bahwa rasionalisasi ini berpotensi menciptakan “sangkar besi” (iron cage), di mana individu terjebak dalam sistem yang impersonal dan mekanistik. Dalam konteks ekonomi platform, proses rasionalisasi tersebut tidak menghilang, melainkan bertransformasi menjadi bentuk yang lebih halus dan terdigitalisasi.

Dalam platform economy, rasionalisasi mengambil wujud algoritmik. Sistem rating, metrik performa, target konversi, dan penalti otomatis berfungsi sebagai perangkat kontrol yang terstandarisasi dan terotomatisasi. Jika dalam birokrasi klasik pengawasan dilakukan oleh atasan melalui aturan administratif, maka dalam birokrasi digital kontrol dijalankan oleh kode, data, dan sistem pembelajaran mesin. Konsep algorithmic management yang dikembangkan dalam kajian kontemporer (misalnya oleh Rosenblat dan Kellogg) menunjukkan bahwa algoritma berfungsi sebagai manajer tak terlihat yang mengatur ritme kerja, menentukan akses terhadap peluang ekonomi, dan mendistribusikan insentif maupun sanksi. Rasionalitas instrumental diinternalisasi melalui metrik performatif, sehingga host terdorong untuk terus mengoptimalkan diri demi mempertahankan visibilitas dan pendapatan dalam ekosistem yang kompetitif.

Rasionalisasi digital ini membawa konsekuensi sosiologis yang signifikan. Pertama, ia menciptakan tekanan psikologis akibat ketidakpastian algoritmik—perubahan sistem dapat memengaruhi pendapatan tanpa transparansi yang memadai. Kedua, ia mendorong kompetisi individual yang intens, karena setiap host dinilai berdasarkan skor dan performa yang dapat dibandingkan secara kuantitatif. Dalam perspektif Weberian yang diperluas oleh teori kontemporer tentang neoliberal governance, mekanisme ini memperkuat individualisasi tanggung jawab dan melemahkan solidaritas kolektif. Disiplin tidak lagi dipaksakan secara eksternal, melainkan diinternalisasi melalui dorongan untuk terus meningkatkan skor dan reputasi. Dengan demikian, birokrasi digital tidak hanya mereproduksi logika rasionalisasi klasik, tetapi juga memperdalam sangkar besi dalam bentuk yang lebih fleksibel, cair, dan berbasis data.

C. Karl Polanyi: Disembedding Ekonomi dan Krisis Sosial

Max Weber memandang modernitas sebagai proses rasionalisasi yang semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk ekonomi. Rasionalisasi ditandai oleh dominasi rasionalitas instrumental—yakni orientasi tindakan berdasarkan kalkulasi efisiensi, prediktabilitas, dan kontrol. Dalam kapitalisme modern, birokrasi menjadi bentuk organisasi ideal karena mampu menghadirkan keteraturan melalui aturan tertulis, hierarki yang jelas, dan prosedur formal. Namun Weber juga memperingatkan bahwa rasionalisasi ini berpotensi menciptakan “sangkar besi” (iron cage), di mana individu terjebak dalam sistem yang impersonal dan mekanistik. Dalam konteks ekonomi platform, proses rasionalisasi tersebut tidak menghilang, melainkan bertransformasi

menjadi bentuk yang lebih halus dan terdigitalisasi.

Dalam platform economy, rasionalisasi mengambil wujud algoritmik. Sistem rating, metrik performa, target konversi, dan penalti otomatis berfungsi sebagai perangkat kontrol yang terstandarisasi dan terotomatisasi. Jika dalam birokrasi klasik pengawasan dilakukan oleh atasan melalui aturan administratif, maka dalam birokrasi digital kontrol dijalankan oleh kode, data, dan sistem pembelajaran mesin. Konsep algorithmic management yang dikembangkan dalam kajian kontemporer (misalnya oleh Rosenblat dan Kellogg) menunjukkan bahwa algoritma berfungsi sebagai manajer tak terlihat yang mengatur ritme kerja, menentukan akses terhadap peluang ekonomi, dan mendistribusikan insentif maupun sanksi. Rasionalitas instrumental diinternalisasi melalui metrik performatif, sehingga host terdorong untuk terus mengoptimalkan diri demi mempertahankan visibilitas dan pendapatan dalam ekosistem yang kompetitif.

Rasionalisasi digital ini membawa konsekuensi sosiologis yang signifikan. Pertama, ia menciptakan tekanan psikologis akibat ketidakpastian algoritmik—perubahan sistem dapat memengaruhi pendapatan tanpa transparansi yang memadai. Kedua, ia mendorong kompetisi individual yang intens, karena setiap host dinilai berdasarkan skor dan performa yang dapat dibandingkan secara kuantitatif. Dalam perspektif Weberian yang diperluas oleh teori kontemporer tentang neoliberal governance, mekanisme ini memperkuat individualisasi tanggung jawab dan melemahkan solidaritas kolektif. Disiplin tidak lagi dipaksakan secara eksternal, melainkan diinternalisasi melalui dorongan untuk terus meningkatkan skor dan reputasi. Dengan demikian, birokrasi digital tidak hanya mereproduksi logika rasionalisasi klasik, tetapi juga memperdalam sangkar besi dalam bentuk yang lebih fleksibel, cair, dan berbasis data.

Polanyi berargumen bahwa dalam masyarakat pra-kapitalis, ekonomi tertanam (embedded) dalam norma sosial. Kapitalisme modern melepaskan ekonomi dari kontrol sosial, menciptakan pasar tenaga kerja yang diperlakukan sebagai komoditas. Platform economy memperlihatkan bentuk baru disembedding. Kerja digital diperlakukan sebagai komoditas fleksibel tanpa perlindungan sosial. Host menjadi “wirausaha diri sendiri” yang menanggung risiko pasar secara individual. Ketika risiko sosial diprivatisasi, muncul prekarisasi—ketidakpastian pendapatan dan ketiadaan jaminan sosial.

Karl Polanyi dalam *The Great Transformation* menjelaskan bahwa dalam masyarakat pra-kapitalis, aktivitas ekonomi tidak berdiri sendiri sebagai sistem otonom, melainkan tertanam (embedded) dalam relasi sosial, norma moral, dan institusi komunitas. Produksi dan distribusi diatur oleh prinsip resiprositas, redistribusi, dan solidaritas sosial, bukan semata-mata oleh mekanisme harga pasar. Kapitalisme modern, menurut Polanyi, melakukan “pemisahan besar” (disembedding) dengan menjadikan pasar sebagai mekanisme pengatur utama kehidupan sosial. Tenaga kerja, tanah, dan uang diperlakukan sebagai komoditas—meskipun secara hakikat bukanlah komoditas murni, melainkan apa yang ia sebut sebagai fictitious commodities. Ketika tenaga kerja diperlakukan sepenuhnya sebagai barang dagangan, relasi sosial menjadi tunduk pada logika pasar.

Dalam konteks platform economy, kita menyaksikan bentuk baru disembedding yang lebih subtil namun sistemik. Kerja digital—seperti yang dilakukan host live streaming—diposisikan sebagai aktivitas fleksibel yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai permintaan pasar. Platform memediasi akses terhadap konsumen dan mengatur distribusi peluang ekonomi melalui algoritma, tanpa menyediakan perlindungan sosial yang memadai. Host dikonstruksikan sebagai “wirausaha diri sendiri” (self-

entrepreneurial subject), sebuah figur yang secara formal bebas, tetapi secara struktural bergantung pada infrastruktur digital yang dikendalikan korporasi platform. Dalam kerangka ini, kerja tidak lagi dilindungi sebagai bagian dari hak sosial, melainkan menjadi komoditas yang nilainya fluktuatif mengikuti dinamika pasar dan perubahan algoritmik.

Ketika risiko ekonomi dan sosial diprivatisasi—dipindahkan dari institusi kolektif ke individu pekerja—muncul fenomena prekarisasi. Ketidakpastian pendapatan, absennya jaminan kesehatan dan perlindungan kerja, serta volatilitas akses pasar menjadi kondisi yang inheren dalam kerja platform. Dalam bahasa Polanyi, ini merupakan konsekuensi dari pasar yang dibiarkan mengatur dirinya sendiri tanpa mekanisme proteksi sosial yang memadai. Prekarisasi bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan sosial dan moral, karena mengikis stabilitas hidup dan solidaritas kolektif. Dengan demikian, platform economy merepresentasikan fase lanjut dari disembedding—di mana digitalisasi mempercepat komodifikasi tenaga kerja dan memperdalam ketegangan antara logika pasar dan kebutuhan perlindungan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-kritis yang berorientasi pada pengembangan interpretasi teoretis atas fenomena kerja digital dalam ekosistem platform. Pertama, dilakukan analisis literatur sosiologi kerja klasik dan kontemporer, dengan menempatkan pemikiran Karl Marx, Max Weber, dan Karl Polanyi sebagai fondasi teoritik, serta mengintegrasikannya dengan teori mutakhir mengenai *platform capitalism*, *algorithmic management*, dan prekarisasi kerja. Analisis literatur ini tidak sekadar bersifat deskriptif, tetapi bertujuan membangun kerangka konseptual yang mampu menjelaskan transformasi relasi produksi, bentuk subordinasi baru, serta perubahan struktur kelas dalam kapitalisme digital.

Kedua, penelitian ini melakukan analisis normatif terhadap regulasi terkait, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, ekonomi digital, dan hubungan kemitraan. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum mengkonstruksi status host dalam platform economy, serta sejauh mana regulasi tersebut mampu merespons dinamika kerja digital yang bersifat fleksibel dan terfragmentasi. Dengan pendekatan ini, norma hukum dipahami bukan hanya sebagai teks formal, tetapi sebagai instrumen yang berinteraksi dengan struktur sosial dan relasi kekuasaan dalam masyarakat.

Ketiga, digunakan pendekatan ekonomi-politik untuk memahami relasi kuasa dalam platform economy. Pendekatan ini menempatkan platform sebagai aktor kapital yang menguasai infrastruktur digital dan mendistribusikan akses ekonomi melalui mekanisme algoritmik. Dengan demikian, fenomena kerja digital dianalisis dalam konteks struktur akumulasi kapital, distribusi risiko, serta konfigurasi kekuasaan antara platform dan pekerja. Secara keseluruhan, pendekatan normatif-kritis ini bertujuan membangun pemahaman teoretis yang komprehensif tentang ambiguitas kemitraan dan prekarisasi kerja digital, serta menempatkannya dalam lanskap perubahan sosial yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kemitraan sebagai Ideologi Fleksibilitas

Narasi kemitraan dalam platform economy dibangun di atas ideologi fleksibilitas. Platform mempromosikan gagasan bahwa host adalah subjek otonom yang bebas

menentukan waktu kerja, intensitas siaran, dan strategi pemasaran personalnya. Dalam kerangka neoliberal, fleksibilitas dipresentasikan sebagai bentuk pembebasan dari rigiditas hubungan kerja industrial yang terikat jam kerja dan hierarki formal. Host diposisikan sebagai *entrepreneur of the self*—istilah yang dalam pembacaan Foucauldian menggambarkan bagaimana individu didorong untuk memandang dirinya sebagai proyek ekonomi yang harus terus dioptimalkan. Dengan demikian, kemitraan tidak hanya menjadi bentuk kontraktual, tetapi juga konstruksi ideologis yang menekankan kemandirian dan tanggung jawab individual.

Namun, jika dianalisis melalui perspektif Marxian, fleksibilitas tersebut bersifat semu karena tetap berada dalam kerangka relasi produksi yang asimetris. Host memang dapat memilih kapan siaran dilakukan, tetapi nilai kerja mereka sepenuhnya bergantung pada infrastruktur distribusi yang dikuasai platform. Visibilitas—sebagai sumber utama konversi ekonomi—ditentukan oleh algoritma yang tidak transparan. Dalam kondisi ini, fleksibilitas menjadi subordinasi terselubung: pekerja tampak bebas, tetapi secara struktural terikat pada logika kapital digital. Kebebasan formal tidak identik dengan otonomi material, karena kontrol atas alat produksi digital tetap berada di tangan platform.

Dari sudut pandang Weberian, fleksibilitas ini juga menunjukkan bentuk rasionalisasi baru yang menginternalisasi disiplin kerja. Host terdorong untuk menyesuaikan jadwal dan gaya performa mereka dengan “jam ramai” algoritmik, tren konsumsi, dan metrik performa yang diukur secara kuantitatif. Rasionalitas instrumental bekerja melalui kalkulasi: kapan waktu paling optimal, bagaimana meningkatkan engagement, dan bagaimana mempertahankan rating. Fleksibilitas akhirnya menjadi kondisional—tergantung pada performa dan kepatuhan terhadap sistem evaluasi digital. Dalam kerangka Weber, kondisi ini memperlihatkan perluasan “sangkar besi” dalam bentuk yang lebih cair dan tidak terlihat.

Dalam perspektif Polanyi, fleksibilitas platform mencerminkan proses disembedding di mana perlindungan sosial dilepaskan atas nama efisiensi pasar. Risiko fluktuasi pendapatan dan perubahan algoritma ditanggung secara individual oleh host. Fleksibilitas bukan lagi pilihan yang dinegosiasikan dalam struktur sosial kolektif, melainkan konsekuensi dari pasar digital yang mengatur dirinya sendiri. Dengan demikian, kemitraan sebagai ideologi fleksibilitas berfungsi menormalisasi individualisasi risiko dan melemahkan solidaritas kolektif. Fleksibilitas yang dipromosikan sebagai kebebasan pada akhirnya menjadi mekanisme adaptasi terhadap sistem yang tetap dikendalikan oleh logika kapital platform.

B. Subordinasi Algoritmik

Subordinasi dalam platform economy tidak lagi tampil dalam bentuk pengawasan langsung oleh manajer atau struktur hierarkis yang kasatmata, melainkan melalui sistem digital yang bekerja secara otomatis dan berbasis data. Host live streaming harus menyesuaikan diri dengan jam ramai algoritmik, target konversi penjualan, serta standar interaksi yang ditentukan secara implisit oleh sistem rating dan metrik performa. Dalam perspektif Marxian, meskipun bentuknya berubah, esensinya tetap serupa: kontrol atas proses produksi berada di tangan pemilik alat produksi—kini berupa algoritma dan infrastruktur digital. Jika dalam kapitalisme industri pengawasan dilakukan melalui mandor dan jadwal kerja pabrik, maka dalam kapitalisme platform kontrol dijalankan

melalui distribusi visibilitas dan akses pasar yang ditentukan oleh sistem komputasional.

Dalam kerangka Weberian, fenomena ini mencerminkan evolusi rasionalisasi menuju birokrasi digital. Aturan tertulis dan hierarki formal digantikan oleh kode dan protokol algoritmik yang mengatur perilaku kerja secara terstandarisasi. Host tidak diperintah secara eksplisit, tetapi diarahkan melalui insentif dan penalti otomatis yang memengaruhi reputasi serta pendapatan mereka. Konsep algorithmic management dalam teori kontemporer menjelaskan bagaimana algoritma berfungsi sebagai manajer tak terlihat yang menetapkan standar performa, mengukur produktivitas secara real-time, dan mengalokasikan peluang ekonomi berdasarkan kalkulasi data. Subordinasi menjadi impersonal—tidak ada figur otoritas yang dapat dinegosiasikan—namun justru lebih efektif karena terinternalisasi dalam praktik kerja sehari-hari.

Transformasi ini menandai pergeseran dari subordinasi industrial ke subordinasi digital. Jika dalam sistem industri kontrol bersifat fisik dan terpusat, maka dalam sistem platform kontrol bersifat tersebar, berbasis metrik, dan bergantung pada evaluasi berkelanjutan. Host terdorong untuk mengatur diri mereka sendiri agar sesuai dengan logika algoritma, sehingga disiplin kerja menjadi mekanisme yang diinternalisasi. Dalam perspektif sosiologi kerja kontemporer, kondisi ini menciptakan bentuk kekuasaan yang lebih subtil namun intens—di mana pengawasan bersifat permanen dan berbasis data. Subordinasi tidak lagi terlihat sebagai paksaan eksternal, melainkan sebagai tuntutan performatif yang melekat dalam arsitektur digital itu sendiri.

C. Individualisasi Risiko dan Prekarisasi

Dalam ekosistem platform, risiko ekonomi tidak lagi dibagi secara kolektif melalui mekanisme perlindungan sosial, melainkan dialihkan kepada individu host. Fluktuasi permintaan pasar, perubahan algoritma, penalti otomatis, hingga penurunan visibilitas menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi pendapatan host tanpa adanya jaminan stabilitas. Platform mempertahankan fleksibilitas operasional dan menghindari kewajiban jaminan sosial dengan tetap mengkategorikan relasi sebagai kemitraan. Dalam perspektif Marxian, kondisi ini mencerminkan strategi eksternalisasi biaya produksi—di mana risiko reproduksi tenaga kerja (keamanan pendapatan, kesehatan, keberlanjutan kerja) dipindahkan dari kapital kepada pekerja itu sendiri.

Guy Standing menyebut kelompok pekerja dengan karakteristik semacam ini sebagai bagian dari “precariat,” yakni kelas sosial baru yang ditandai oleh ketidakpastian kerja, ketiadaan proteksi sosial, dan lemahnya identitas kolektif. Berbeda dengan proletariat industri yang relatif memiliki kontrak kerja dan perlindungan tertentu, precariat hidup dalam kondisi temporer dan rentan terhadap volatilitas pasar. Host live streaming menunjukkan ciri-ciri tersebut: pendapatan bergantung pada performa dan algoritma, tidak ada jaminan sosial formal, serta tidak memiliki kepastian jangka panjang atas keberlanjutan akses pasar. Ketidakpastian ini bukan sekadar aspek teknis, melainkan struktur sosial yang membentuk pengalaman kerja sehari-hari.

Dalam kerangka Polanyian, privatisasi risiko ini merupakan bentuk lanjut dari *disembedding* pasar tenaga kerja. Ketika kerja diperlakukan sepenuhnya sebagai komoditas fleksibel, perlindungan sosial menjadi opsional, bukan inheren. Sementara itu, dalam perspektif Weberian, rasionalisasi ekonomi mendorong efisiensi dengan meminimalkan kewajiban institusional, tetapi konsekuensinya adalah meningkatnya tekanan psikologis dan kompetisi individual. Dengan demikian, precariat dalam platform

economy bukan hanya fenomena ekonomi, melainkan refleksi dari restrukturisasi relasi kerja yang menempatkan fleksibilitas di atas keamanan sosial, serta otonomi formal di atas stabilitas material.

D. Fragmentasi Solidaritas Kerja

Model kemitraan dalam platform economy secara sistematis mengkonstruksi host sebagai subjek individual yang kompetitif, bukan sebagai bagian dari kolektivitas pekerja. Setiap host dinilai berdasarkan metrik performa personal—jumlah penonton, tingkat konversi, rating, dan engagement—yang secara implisit mendorong persaingan horizontal antarsesama host. Dalam perspektif Marxian, fragmentasi ini menghambat terbentuknya kesadaran kelas (*class consciousness*), karena pekerja tidak melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok dengan kepentingan struktural yang sama, melainkan sebagai individu yang bersaing dalam pasar yang sama. Kapital platform diuntungkan dari kondisi ini, karena solidaritas yang lemah mengurangi potensi resistensi kolektif terhadap relasi produksi yang timpang.

Ketiadaan status pekerja formal semakin memperkuat kondisi tersebut. Tanpa pengakuan sebagai pekerja, host tidak memiliki landasan hukum untuk membentuk serikat atau melakukan perundingan kolektif sebagaimana diatur dalam sistem hubungan industrial konvensional. Dalam kerangka Weberian, rasionalisasi digital menciptakan hubungan kerja yang terdesentralisasi dan impersonal, sehingga sulit mengidentifikasi locus otoritas yang dapat dinegosiasikan. Kekuasaan tidak terpusat pada figur manajer tertentu, melainkan tersebar dalam sistem algoritmik yang tidak transparan. Hal ini menyulitkan artikulasi tuntutan kolektif, karena relasi dominasi tampak teknis dan netral, bukan sosial dan politis.

Fragmentasi individual ini pada akhirnya memperkuat dominasi struktural platform. Dengan memosisikan host sebagai “mitra independen,” platform menghindari kewajiban institusional sekaligus menginternalisasi logika kompetisi ke dalam praktik kerja sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi kerja kontemporer, kondisi ini mencerminkan proses individualisasi risiko dan tanggung jawab yang menjadi ciri khas neoliberal governance. Posisi tawar kolektif melemah karena tidak ada identitas pekerja yang solid dan tidak ada ruang formal untuk negosiasi bersama. Akibatnya, relasi kuasa tetap timpang: platform mempertahankan kontrol atas infrastruktur dan aturan main, sementara host beroperasi dalam ruang yang terfragmentasi dan kompetitif tanpa perlindungan kolektif yang memadai.

DISKUSI

Integrasi teori Karl Marx, Max Weber, dan Karl Polanyi memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dinamika kerja dalam platform economy. Dari perspektif Marx, relasi antara host dan platform menunjukkan karakteristik relasi produksi kapitalistik yang telah bertransformasi ke ranah digital. Kepemilikan atas alat produksi—kini berupa algoritma, data, dan infrastruktur distribusi—berada di tangan platform sebagai kapital digital. Host menyediakan tenaga kerja performatif dan afektif yang menghasilkan nilai ekonomi sekaligus data, sementara surplus value diekstraksi melalui komisi transaksi dan monetisasi informasi. Dengan demikian, kapitalisme platform bukanlah bentuk ekonomi yang netral, melainkan konfigurasi baru dari akumulasi kapital berbasis data.

Sementara itu, analisis Weberian menyoroti dimensi rasionalisasi yang semakin mendalam dalam bentuk disiplin algoritmik. Platform mengatur kerja melalui metrik kuantitatif, sistem rating, dan evaluasi otomatis yang menciptakan standar performa impersonal dan terukur. Rasionalitas instrumental mendominasi praktik kerja: host terdorong untuk mengoptimalkan waktu siaran, meningkatkan engagement, dan mematuhi logika algoritma demi mempertahankan visibilitas. Disiplin tidak lagi hadir melalui pengawasan langsung, tetapi melalui mekanisme evaluasi berbasis data yang terinternalisasi. Ini merupakan bentuk baru birokrasi digital—efisien, terstandarisasi, namun juga menciptakan tekanan dan ketergantungan struktural.

Dalam kerangka Polanyi, ekonomi digital memperlihatkan proses disembedding yang semakin intensif. Kerja platform diperlakukan sebagai komoditas fleksibel yang tunduk pada mekanisme pasar dan perubahan algoritma, tanpa jaminan perlindungan sosial yang memadai. Risiko fluktuasi pendapatan dan ketidakpastian kerja dialihkan kepada individu host, sementara platform mempertahankan fleksibilitas institusional. Fenomena host live streaming dengan demikian mencerminkan kombinasi ketiga dimensi tersebut: relasi produksi kapitalistik berbasis data (Marx), disiplin rasionalisasi algoritmik (Weber), dan pelepasan ekonomi dari proteksi sosial (Polanyi). Oleh karena itu, platform economy tidak dapat dipahami sekadar sebagai inovasi teknologi, melainkan sebagai reorganisasi mendasar atas relasi kerja dan distribusi kekuasaan dalam kapitalisme kontemporer.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan integrasi analisis Marx, Weber, dan Polanyi, penelitian ini menyimpulkan bahwa posisi host live streaming dalam ekosistem platform economy bersifat ambigu secara formal, namun subordinatif secara struktural. Secara normatif, host dikategorikan sebagai mitra independen atau pelaku usaha mandiri. Namun dalam praktiknya, mereka tidak memiliki kontrol atas alat produksi digital—algoritma, data, dan akses pasar—yang sepenuhnya dikuasai platform. Dalam perspektif Marxian, kondisi ini mencerminkan relasi produksi kapitalistik berbasis data, di mana surplus value diekstraksi melalui komisi transaksi dan monetisasi data, sementara tenaga kerja digital tetap berada dalam ketergantungan struktural.

Dari sudut pandang Weberian, kerja host berada dalam rezim rasionalisasi algoritmik yang menciptakan disiplin impersonal dan terstandarisasi. Sistem rating, target performa, dan pengaturan visibilitas membentuk birokrasi digital yang efektif namun tidak transparan. Subordinasi tidak lagi hadir dalam bentuk hierarki industrial, melainkan melalui mekanisme pengawasan berbasis data yang terinternalisasi. Fleksibilitas yang dipromosikan platform pada akhirnya bersifat kondisional dan bergantung pada kepatuhan terhadap logika sistem digital.

Dalam kerangka Polanyian, fenomena ini menunjukkan proses disembedding ekonomi digital dari perlindungan sosial. Risiko fluktuasi pasar, penalti algoritmik, dan ketidakpastian pendapatan diprivatisasi kepada individu host. Kondisi tersebut melahirkan prekarisasi kerja digital—ketidakamanan ekonomi, absennya jaminan sosial, dan lemahnya posisi tawar kolektif. Dengan demikian, platform economy bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan reorganisasi relasi kerja dan distribusi kekuasaan dalam kapitalisme kontemporer yang memperdalam asimetri struktural antara platform dan pekerja digital.

B. SARAN

Pertama, kebijakan publik perlu mengakui dimensi sosial kerja digital dengan melampaui pendekatan legal formal yang semata-mata berbasis kategorisasi “pekerja” atau “mitra.” Diperlukan kerangka regulasi adaptif yang mempertimbangkan realitas subordinasi algoritmik dan ketergantungan ekonomi dalam platform economy. Pengakuan terhadap bentuk kerja digital sebagai kategori kerja dengan karakteristik khusus dapat menjadi langkah awal untuk menjamin perlindungan minimal tanpa mengabaikan dinamika fleksibilitas.

Kedua, regulasi perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas algoritmik. Mengingat algoritma berfungsi sebagai mekanisme manajerial, maka mekanisme banding, kejelasan standar evaluasi, dan akses informasi mengenai sistem penalti menjadi penting untuk mencegah dominasi sepihak. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan sosial dalam distribusi peluang ekonomi.

Ketiga, negara dan masyarakat sipil perlu mendorong pembentukan ruang kolektif bagi pekerja digital. Fragmentasi individual yang melekat dalam model kemitraan melemahkan solidaritas dan posisi tawar host. Fasilitas asosiasi atau forum kolektif pekerja platform dapat menjadi instrumen untuk memperkuat negosiasi dan perlindungan sosial secara lebih demokratis.

Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan agar perumusan kebijakan digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi dan inovasi teknologi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara fleksibilitas dan keamanan sosial. Kerja digital harus dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang memerlukan perlindungan, bukan sekadar sebagai aktivitas pasar yang tunduk sepenuhnya pada logika algoritma dan kompetisi individual.

DAFTAR PUSTAKA

- De Stefano, V. (2016). The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork and labour protection in the ‘gig-economy’ (ILO Working Paper). International Labour Organization. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29426.12486> (ILO working paper)
- Gorwa, R. (2019). What is platform governance? *Information, Communication & Society*, 22(6), 854–871. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1573914>
- Graham, M., & Anwar, M. A. (2019). The global gig economy: Towards a planetary labour market? *First Monday*, 24(4). <https://doi.org/10.5210/FM.V24I4.9913>
- Jarrahi, M. H., Newlands, G., Lee, M. K., Wolf, C. T., Kinder, E., & Sutherland, W. (2021). Algorithmic management in a work context. *Big Data & Society*, 8(2). <https://doi.org/10.1177/20539517211020332>
- J. Adams-Prassl (2019). What if your boss was an algorithm? The rise of artificial intelligence at work. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 41(1), 123–? (membahas implikasi hukum dan regulasi AI di tempat kerja — berguna untuk pembahasan kebijakan)
- Kellogg, K. C., Valentine, M. A., & Christin, A. (2020). *Algorithms at work: The new contested terrain of control*. *Academy of Management Annals*, 14(1), 366–410. <https://doi.org/10.5465/annals.2018.0174>

- Lehdonvirta, V. (2018). Flexibility in the gig economy: Managing time on three online piecework platforms. *New Technology, Work and Employment*, 33(2), 13–29. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12102>
- Maksum, M.J.S. (2020). *Hukum Dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marx, K. (1976). *Capital: A critique of political economy* (Vol. 1, B. Fowkes, Trans.). Penguin Books. (Original work published 1867)
- Mateescu, A., & Nguyen, A. (2019). Explainer: Algorithmic management in the workplace. Data & Society Research Institute. https://datasociety.net/wp-content/uploads/2019/02/DS_Algorithmic_Management_Explainer.pdf
- Polanyi, K. (2001). *The great transformation: The political and economic origins of our time* (2nd ed.). Beacon Press. (Original work published 1944)
- Rosenblat, A. (2018). *Uberland: How algorithms are rewriting the rules of work*. University of California Press.
- Sadowski, J. (2019). When data is capital: Datafication, accumulation, and extraction. *Big Data & Society*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2053951718820549>
- Srnicek, N. (2017). *Platform capitalism*. Polity Press.
- Standing, G. (2011). *The precariat: The new dangerous class*. Bloomsbury Academic.
- van Doorn, N. (2017). Platform labor: On the gendered and racialized exploitation of low-income service work in the ‘on-demand’ economy. *New Media & Society*, 19(4), 483–501. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1294194>
- Veale, M., Silberman, M., & Binns, R. (2023). Fortifying the algorithmic management provisions in the proposed Platform Work Directive. *European Labour Law Journal*. Advance online / article; (discusses regulatory interventions and transparency safeguards). <https://doi.org/10.1177/20319525231167983>
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Original work published 1922)
- Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy. *Work, Employment and Society*, 33(1), 56–75. <https://doi.org/10.1177/0950017018785616>
- Woodcock, J. (2020). *The gig economy*. (Review / synthesis useful untuk framing precarity; see *Work, Employment and Society* collections and *Oxford Handbook* chapters.) — (gunakan sebagai bacaan komprehensif untuk bagian teoretis dan kontekstual)